



**SALINAN**

**BUPATI PRINGSEWU**  
**PROVINSI LAMPUNG**  
**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU**  
**NOMOR 21 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PRINGSEWU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 agar dapat berjalan tertib, teratur, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab, dipandang perlu untuk menyusun standar belanja sebagai pedoman bagi pelaksana kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
-

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5352);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
  26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
  29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);
-

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2017.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
  9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
  10. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SOPD yang dipimpinnya.
  11. Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SOPD.
  12. Pejabat Penatausahaan Keuangan SOPD yang selanjutnya disebut PPK-SOPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi Tata Usaha Keuangan pada SOPD.
  13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah Pejabat pada Unit Kerja SOPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
  14. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SOPD.
  15. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SOPD.
  16. Program adalah penjabaran kebijakan SOPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SOPD.
  17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SOPD sebagai bagian dan pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dan beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/ jasa.
-

18. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
19. Pengeluaran Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
20. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 2

Standar Belanja merupakan acuan tertinggi belanja kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pringsewu.

#### Pasal 3

Standar Belanja digunakan sebagai Pedoman bagi Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (RKA-SOPD) dan pelaksanaan Kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (DPA-SOPD).

#### Pasal 4

Terhadap usulan biaya kegiatan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, tetapi diperlukan oleh SOPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu harus melalui Kajian dan Analisa dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang perhitungannya dilakukan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip efisien, efektif, bersaing, transparan, akuntabel dan mencantumkan besaran biaya yang diberikan.

#### Pasal 5

Dengan ditetapkannya Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka segala sesuatu yang mengakibatkan beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu harus mengacu pada Standar Belanja dimaksud.

#### Pasal 6

Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB II  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 33 Tahun 2016 tentang Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 15 Juni 2017  
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal 15 Juni 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR 21

**Sesuai dengan Aslinya**  
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,

  
WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR : 21  
TAHUN : 15 Juni 2017

STANDAR BELANJA  
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU  
TAHUN ANGGARAN 2017

I. Honorarium Pengelola Keuangan, Barang dan Kegiatan

a. Pengelola Anggaran/Barang pada OPD

1. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran OPD dengan rincian sebagai berikut:

| No | Pengguna Anggaran                            | Satuan | Biaya         |
|----|--|--------|---------------|
| 1  | Pagu anggaran s/d 500 juta                   | O/B    | Rp. 500.000   |
| 2  | Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar   | O/B    | Rp. 600.000   |
| 3  | Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar | O/B    | Rp. 700.000   |
| 4  | Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar | O/B    | Rp. 800.000   |
| 5  | Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar  | O/B    | Rp. 900.000   |
| 6  | Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar | O/B    | Rp. 1.000.000 |
| 7  | Pagu anggaran diatas 50 Milyar               | O/B    | Rp. 1.250.000 |

2. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

| No | Kuasa Pengguna Anggaran/Barang               | Satuan | Biaya         |
|----|--|--------|---------------|
| 1  | Pagu anggaran s/d 500 juta                   | O/B    | Rp. 400.000   |
| 2  | Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar   | O/B    | Rp. 500.000   |
| 3  | Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar | O/B    | Rp. 600.000   |
| 4  | Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar | O/B    | Rp. 700.000   |
| 5  | Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar  | O/B    | Rp. 800.000   |
| 6  | Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar | O/B    | Rp. 900.000   |
| 7  | Pagu anggaran diatas 50 Milyar               | O/B    | Rp. 1.000.000 |

3. Pejabat Penatausahaan Keuangan-OPD mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

| No | Pejabat Penatausahaan Keuangan               | Satuan | Biaya       |
|----|--|--------|-------------|
| 1  | Pagu anggaran s/d 500 juta                   | O/B    | Rp. 300.000 |
| 2  | Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar   | O/B    | Rp. 400.000 |
| 3  | Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar | O/B    | Rp. 450.000 |
| 4  | Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar | O/B    | Rp. 500.000 |
| 5  | Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar  | O/B    | Rp. 550.000 |
| 6  | Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar | O/B    | Rp. 600.000 |
| 7  | Pagu anggaran diatas 50 Milyar               | O/B    | Rp. 700.000 |

4. Pejabat Pembuat Komitmen mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

| No | Pejabat Pembuat Komitmen                     | Satuan | Biaya         |
|----|--|--------|---------------|
| 1  | Pagu anggaran s/d 500 juta                   | O/B    | Rp. 750.000   |
| 2  | Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar   | O/B    | Rp. 1.000.000 |
| 3  | Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar | O/B    | Rp. 1.250.000 |
| 4  | Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar | O/B    | Rp. 1.500.000 |
| 5  | Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar  | O/B    | Rp. 1.750.000 |
| 6  | Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar | O/B    | Rp. 2.000.000 |
| 7  | Pagu anggaran diatas 50 Milyar               | O/B    | Rp. 2.250.000 |

5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mendapat honorarium menurut jumlah seluruh pagu anggaran kegiatan yang menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dengan rincian sebagai berikut:

| No | PPTK   | Satuan | Biaya       |
|----|--|--------|-------------|
| 1  | Pagu anggaran s/d 500 juta                   | O/B    | Rp. 300.000 |
| 2  | Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar   | O/B    | Rp. 350.000 |
| 3  | Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 10 Milyar  | O/B    | Rp. 450.000 |
| 4  | Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar | O/B    | Rp. 550.000 |
| 5  | Pagu anggaran diatas 50 Milyar               | O/B    | Rp. 650.000 |

6. Tenaga Teknis Lapangan Pekerjaan mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

| No | TTLP   | Satuan | Biaya       |
|----|--|--------|-------------|
| 1  | Pagu anggaran s/d 500 juta                   | O/B    | Rp. 200.000 |
| 2  | Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar   | O/B    | Rp. 250.000 |
| 3  | Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar | O/B    | Rp. 300.000 |
| 4  | Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar | O/B    | Rp. 350.000 |
| 5  | Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar  | O/B    | Rp. 400.000 |
| 6  | Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar | O/B    | Rp. 450.000 |
| 7  | Pagu anggaran diatas 50 Milyar               | O/B    | Rp. 500.000 |

7. Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

a. Bendahara Pengeluaran

| No | Bendahara Pengeluaran                         | Satuan | Biaya         |
|----|---|--------|---------------|
| 1  | Pagu anggaran s/d 500 juta                    | O/B    | Rp. 300.000   |
| 2  | Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar    | O/B    | Rp. 400.000   |
| 3  | Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar  | O/B    | Rp. 500.000   |
| 4  | Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar  | O/B    | Rp. 600.000   |
| 5  | Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar   | O/B    | Rp. 700.000   |
| 6  | Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar  | O/B    | Rp. 800.000   |
| 7  | Pagu anggaran diatas 50 Milyar                | O/B    | Rp. 900.000   |
| 8  | Bendahara Pengeluaran SKPKD diatas 100 Milyar | O/B    | Rp. 1.500.000 |

b. Bendahara Penerimaan

| No | Bendahara Penerimaan                         | Satuan | Biaya       |
|----|--|--------|-------------|
| 1  | Pagu anggaran s/d 500 juta                   | O/B    | Rp. 300.000 |
| 2  | Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar   | O/B    | Rp. 400.000 |
| 3  | Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar | O/B    | Rp. 450.000 |
| 4  | Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar | O/B    | Rp. 500.000 |
| 5  | Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar  | O/B    | Rp. 600.000 |
| 6  | Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar | O/B    | Rp. 700.000 |
| 7  | Pagu anggaran diatas 50 Milyar               | O/B    | Rp. 800.000 |

8. Bendahara Penerimaan Pembantu atau Bendahara Pengeluaran Pembantu mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

a. Bendahara Pengeluaran Pembantu

| No | Bendahara Pengeluaran Pembantu               | Satuan | Biaya       |
|----|--|--------|-------------|
| 1  | Pagu anggaran s/d 500 juta                   | O/B    | Rp. 200.000 |
| 2  | Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar   | O/B    | Rp. 300.000 |
| 3  | Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar | O/B    | Rp. 350.000 |
| 4  | Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar | O/B    | Rp. 400.000 |
| 5  | Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar  | O/B    | Rp. 450.000 |
| 6  | Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar | O/B    | Rp. 500.000 |
| 7  | Pagu anggaran diatas 50 Milyar               | O/B    | Rp. 600.000 |

b. Bendahara Penerimaan Pembantu

| No | Bendahara Penerimaan Pembantu                | Satuan | Biaya       |
|----|--|--------|-------------|
| 1  | Pagu anggaran s/d 500 juta                   | O/B    | Rp. 200.000 |
| 2  | Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar   | O/B    | Rp. 250.000 |
| 3  | Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar | O/B    | Rp. 300.000 |
| 4  | Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar | O/B    | Rp. 350.000 |
| 5  | Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar  | O/B    | Rp. 400.000 |
| 6  | Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar | O/B    | Rp. 450.000 |
| 7  | Pagu anggaran diatas 50 Milyar               | O/B    | Rp. 500.000 |

9. Pembantu Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

a. Pembantu Bendahara Pengeluaran/Staf Pengelola

| No | Pembantu Bendahara Pengeluaran/Staf Pengelola | Satuan | Biaya       |
|----|---|--------|-------------|
| 1  | Pagu anggaran s/d 500 juta                    | O/B    | Rp. 150.000 |
| 2  | Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar    | O/B    | Rp. 175.000 |
| 3  | Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar  | O/B    | Rp. 200.000 |
| 4  | Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar  | O/B    | Rp. 250.000 |
| 5  | Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar   | O/B    | Rp. 270.000 |
| 6  | Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar  | O/B    | Rp. 340.000 |
| 7  | Pagu anggaran diatas 50 Milyar                | O/B    | Rp. 410.000 |

b. Pembantu Bendahara Penerimaan/Staf Pengelola

| No | Pembantu Bendahara Penerimaan/Staf Pengelola | Satuan | Biaya       |
|----|--|--------|-------------|
| 1  | Pagu anggaran s/d 500 juta                   | O/B    | Rp. 100.000 |
| 2  | Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar   | O/B    | Rp. 125.000 |
| 3  | Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar | O/B    | Rp. 150.000 |
| 4  | Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar | O/B    | Rp. 200.000 |
| 5  | Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar  | O/B    | Rp. 250.000 |
| 6  | Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar | O/B    | Rp. 300.000 |
| 7  | Pagu anggaran diatas 50 Milyar               | O/B    | Rp. 350.000 |

10. Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna, serta Pengurus Barang Pembantu di Kuasa Pengguna pada OPD mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna

| No | Pengurus Barang  | Satuan | Biaya       |
|----|--|--------|-------------|
| 1  | Pengurus Barang Pengguna DisdikBUD, Dinkes, PU dan Pera, Sekretariat Daerah          | OB     | Rp. 750.000 |
| 2  | Pengurus Barang Pengguna OPD selain yang tertera di nomor 1                          | OB     | Rp. 500.000 |
| 3  | Pembantu Pengurus Barang Pengguna DisdikBUD, Dinkes, PU dan Pera, Sekretariat Daerah | OB     | Rp. 500.000 |
| 4  | Pembantu Pengurus Barang Pengguna OPD selain yang tertera di nomor 3                 | OB     | Rp. 300.000 |

b. Pengurus Barang Pembantu di Kuasa Pengguna Barang

| No | Pengurus Barang Pengguna                                 | Satuan | Biaya       |
|----|--|--------|-------------|
| 1  | Pengurus Barang Pembantu di RSUD                         | OB     | Rp. 650.000 |
| 2  | Pengurus Barang Pembantu di UPT Instalasi Farmasi Dinkes | OB     | Rp. 500.000 |
| 3  | Pengurus Barang Pembantu di SMPN, Puskesmas, UPTD        | OB     | Rp. 400.000 |
| 4  | Pengurus Barang Pembantu di SDN                          | OB     | Rp. 300.000 |
| 5  | Pengurus Barang Pembantu Pustu dan Kelurahan             | OB     | Rp. 150.000 |

b. Belanja Operasional, Tambahan Penghasilan, Honor Pelaksana Kegiatan

| No | Uraian   | Satuan | Biaya           |
|----|--|--------|-----------------|
|    | 2  | 3      | 4               |
| 1  | Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah                          |        |                 |
|    | a. Bupati  | O/T    | Rp. 225.000.000 |
|    | b. Wakil Bupati  | O/T    | Rp. 175.000.000 |
| 2  | a. Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Beban Kerja Pejabat Struktural |        |                 |
|    | 1. Sekretaris Daerah   | O/B    | Rp. 15.000.000  |

| 1 | 2  | 3   | 4              |
|---|--|-----|----------------|
|   | 2. Asisten   | O/B | Rp. 12.500.000 |
|   | 3. Staf Ahli Bupati  | O/B | Rp. 10.000.000 |
|   | 4. Kepala Badan/Dinas/Sekwan/Inspektur   | O/B | Rp. 6.500.000  |
|   | 5. Kepala Kantor/Kepala Bagian/Direktur RSUD/<br>Sekretaris BPKAD, Bappeda, Bapenda, Inspektorat                 | O/B | Rp. 3.500.000  |
|   | 6. Sekretaris KPU, Camat, Sekretaris Korpri, Irban<br>Inspektorat, Kabid pada BPKAD, Bappeda dan<br>Bapenda      | O/B | Rp. 3.000.000  |
|   | 7. Sekretaris Badan/Dinas/Instansi Lainnya   | O/B | Rp. 2.500.000  |
|   | 8. Kabid pada Badan/Dinas/Instansi Lainnya, Sekcam   | O/B | Rp. 1.500.000  |
|   | 9. Kasubbag/Kasubid pada BPKAD, Bapenda dan<br>Bappeda, Kepala UPT pada Bapenda dan Kasubbag<br>pada Inspektorat | O/B | Rp. 1.500.000  |
|   | 10. Kasubbag Protokol pada Sekretariat Daerah,<br>Sekretariat DPRD dan Lurah                                     | O/B | Rp. 1.250.000  |
|   | 11. Kasubbag pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat<br>DPRD   | O/B | Rp. 1.000.000  |
|   | 12. Kasi/Kasubbag/Kasubbid/Kasi Kecamatan,<br>Kasubbag TU UPT pada Bapenda dan Kepala UPT<br>lainnya             | O/B | Rp. 750.000    |
|   | 13. Ajudan Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD  | O/B | Rp. 750.000    |
|   | 14. Sekretaris Kelurahan   | O/B | Rp. 600.000    |
|   | 15. Kaur Kelurahan/Kasubbag Kecamatan/Korpri   | O/B | Rp. 500.000    |
|   | b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja<br>Pejabat Fungsional Auditor/P2UPD                              |     |                |
|   | 1. Auditor / JF-P2UPD Madya  | O/B | Rp. 4.000.000  |
|   | 2. Auditor / JF-P2UPD Muda   | O/B | Rp. 3.000.000  |
|   | 3. Auditor / JF-P2UPD Pertama  | O/B | Rp. 2.000.000  |
| 3 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi  |     |                |
|   | a. Penguji Kendaraan Bermotor  | O/B | Rp. 1.000.000  |
|   | b. Analisis Kepegawaian  | O/B | Rp. 750.000    |
| 4 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah  |     |                |
|   | a. Ketua   | O/B | Rp. 4.000.000  |
|   | b. Wakil Ketua/ Koordinator  | O/B | Rp. 3.500.000  |
|   | c. Sekretaris  | O/B | Rp. 3.000.000  |
|   | d. Anggota   | O/B | Rp. 2.000.000  |
|   | e. Koordinator Sekretariat   | O/B | Rp. 3.000.000  |
|   | f. Anggota Sekretariat   | O/B | Rp. 1.000.000  |
| 5 | Honor Tim Sinkronisasi Program Pembangunan Daerah  |     |                |
|   | a. Koordinator Daerah  | O/B | Rp. 2.500.000  |
|   | b. Wakil Koordinator   | O/B | Rp. 2.000.000  |
|   | c. Ketua   | O/B | Rp. 2.000.000  |
|   | d. Sekretaris  | O/B | Rp. 1.750.000  |
|   | e. Koordinator Pelaksana   | O/B | Rp. 1.500.000  |
|   | f. Pelaksana   | O/B | Rp. 1.250.000  |
|   | g. Staf ASN  | O/B | Rp. 1.000.000  |
|   | h. Staf Non ASN  | O/B | Rp. 300.000    |

| 1  | 2  | 3        | 4             |
|----|--|----------|---------------|
| 6  | Honorarium Tim Penyusunan LKPD, LKPI dan LKD                           |          |               |
|    | a. Ketua   | O/B      | Rp. 2.000.000 |
|    | b. Wakil Ketua / Koordinator   | O/B      | Rp. 1.500.000 |
|    | c. Sekretaris  | O/B      | Rp. 1.250.000 |
|    | d. Anggota   | O/B      | Rp. 1.000.000 |
|    | e. Koordinator Sekretariat   | O/B      | Rp. 1.250.000 |
|    | f. Anggota Sekretariat   | O/B      | Rp. 750.000   |
| 7  | Honorarium Tim Reviu LKPD, LKPI, LAKIP dan APBD                        |          |               |
|    | a. Ketua   | O/K      | Rp. 3.000.000 |
|    | b. Wakil Ketua/Koordinator   | O/K      | Rp. 2.500.000 |
|    | c. Sekretaris  | O/K      | Rp. 2.000.000 |
|    | d. Anggota   | O/K      | Rp. 1.500.000 |
| 8  | a. Honor Pengelola Kegiatan Pimpinan Daerah                            |          |               |
|    | 1. Kabag Humas dan Protokol  | O/B      | Rp. 2.000.000 |
|    | 2. Kasubbag Protokol   | O/B      | Rp. 1.500.000 |
|    | 3. Staf ASN  | O/B      | Rp. 1.000.000 |
|    | 4. Staf Non ASN  | O/B      | Rp. 750.000   |
|    | b. Honor Pengelola Kegiatan Pimpinan Daerah                            |          |               |
|    | 1. Pembina   | O/K      | Rp. 400.000   |
|    | 2. Pengarah  | O/K      | Rp. 350.000   |
|    | 3. Ketua   | O/K      | Rp. 250.000   |
|    | 4. Anggota   | O/K      | Rp. 175.000   |
|    | c. Honorarium Pengamanan dan Pengawasan Pejabat                        | O/B      | Rp. 1.800.000 |
| 9  | Honor Pengelola Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintahan Daerah |          |               |
|    | a. Kasubbag Kehumasan dan Pers, Kasubbag Publikasi dan Dokumentasi     | O/B      | Rp. 1.500.000 |
|    | b. Staf ASN (Anggota)  | O/B      | Rp. 1.000.000 |
|    | c. Staf Non ASN (Anggota)  | O/B      | Rp. 750.000   |
| 10 | Honor Tim Penyusunan dan Penjelasan Peraturan Daerah                   |          |               |
|    | a. Koordinator   | /Naskah  | Rp. 2.000.000 |
|    | b. Sekretaris  | /Naskah  | Rp. 1.500.000 |
|    | c. Anggota   | /Naskah  | Rp. 1.000.000 |
|    | d. Koordinator Sekretariat   | /Naskah  | Rp. 1.000.000 |
|    | e. Anggota Sekretariat   | /Naskah  | Rp. 750.000   |
| 11 | Honor Tim Penanganan Perkara Litigasi dan Non Litigasi                 |          |               |
|    | a. Koordinator   | /Perkara | Rp. 1.500.000 |
|    | b. Sekretaris  | /Perkara | Rp. 1.250.000 |
|    | c. Anggota   | /Perkara | Rp. 1.000.000 |
|    | d. Staf Sekretariat  | /Perkara | Rp. 500.000   |
| 12 | Honor Tim Asistensi Penyusun dan Penjelasan Peraturan Bupati           |          |               |
|    | a. Ketua   | /Naskah  | Rp. 1.500.000 |
|    | b. Sekretaris  | /Naskah  | Rp. 1.250.000 |
|    | c. Anggota   | /Naskah  | Rp. 1.000.000 |
|    | d. Koordinator Sekretariat   | /Naskah  | Rp. 1.000.000 |
|    | e. Staf Sekretariat  | /Naskah  | Rp. 750.000   |

| 1  | 2  | 3  | 4  |
|----|--|--|--|
| 13 | Honor Tim RANHAM<br>a. Penanggungjawab<br>b. Ketua<br>c. Sekretaris<br>d. Anggota  | O/B<br>O/B<br>O/B<br>O/B                                 | Rp. -<br>Rp. 500.000<br>Rp. 400.000<br>Rp. 300.000   |
| 14 | Honor Tim Pengelola Website JDIIH<br>a. Ketua<br>b. Sekretaris<br>c. PokjaUnit Pengembangan dan Pemanfaatan Website JDIIH<br>d. PokjaUnit Dokumentasi dan Literasi Produk Hukum<br>e. Anggota  | O/B<br>O/B<br>O/B<br>O/B<br>O/B                          | Rp. 1.500.000<br>Rp. 1.250.000<br>Rp. 1.000.000<br>Rp. 1.000.000<br>Rp. 500.000  |
| 15 | Honor Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan yang dilaksanakan diatas 15 hari kerja, maka dibayar per bulan (bulanan)<br>a. Pengarah/Pembina<br>b. Penasehat/Penanggungjawab<br>c. Ketua<br>d. Wakil Ketua<br>e. Sekretaris<br>f. Anggota  | O/B<br>O/B<br>O/B<br>O/B<br>O/B<br>O/B                   | Rp. 250.000<br>Rp. 225.000<br>Rp. 200.000<br>Rp. 200.000<br>Rp. 175.000<br>Rp. 150.000                                     |
| 16 | Honor Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan yang dilaksanakan maksimal 15 hari kerja, maka dibayar per hari (harian)<br>a. Pengarah/Pembina<br>b. Penasehat/Penanggungjawab<br>c. Ketua<br>d. Wakil Ketua<br>e. Sekretaris<br>f. Anggota  | O/H<br>O/H<br>O/H<br>O/H<br>O/H<br>O/H                   | Rp. 100.000<br>Rp. 80.000<br>Rp. 75.000<br>Rp. 65.000<br>Rp. 60.000<br>Rp. 50.000  |
| 17 | Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber / Pengajar / Penceramah / Pemberi Materi Diklat / Bimtek / Kursus / Seminar atau Kegiatan Lainnya (Pusat & Provinsi) yang ditetapkan atas dasar SK Bupati<br>a. Eselon I/Pejabat Negara/ Dosen Tamu/yang disetarakan<br>b. Eselon II/Guru Besar/ Dosen Tamu/yang disetarakan<br>c. Eselon III/ Dosen Tamu/yang disetarakan<br>d. Eselon IV kebawah/ Dosen Tamu/yang disetarakan<br>e. Penceramah Agama<br>f. Moderator<br>g. MC dan Do'a<br>h. Tenaga Ahli kegiatan | O/J<br>O/J<br>O/J<br>O/J<br>O/K<br>O/Materi<br>O/K<br>OH | Rp. 1.200.000<br>Rp. 1.000.000<br>Rp. 800.000<br>Rp. 600.000<br>Rp. 1.000.000<br>Rp. 200.000<br>Rp. 200.000<br>Rp. 600.000 |
| 18 | Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber / Pengajar / Penceramah / Pemberi Materi Diklat / Bimtek / Kursus / Seminar atau Kegiatan Lainnya (Daerah) yang ditetapkan atas dasar SK Pengguna Anggaran<br>a. Pengajar/Narasumber<br>1) Eselon II/Dosen Tamu/yang disetarakan<br>2) Eselon III/Dosen Tamu/yang disetarakan<br>3) Eselon IV kebawah/Dosen Tamu/yang disetarakan   | O/JP<br>O/JP<br>O/JP                                     | Rp. 500.000<br>Rp. 400.000<br>Rp. 300.000  |

| 1  | 2   | 3  | 4  |
|----|---|--|--|
|    | b. Penceramah Agama<br>c. Moderator<br>d. Instruktur<br>e. MC dan Do'a, Dirijen<br>f. Biaya Pembuatan Materi<br>g. Tenaga Ahli Kegiatan   | O/K<br>O/Materi<br>O/JP<br>O/K<br>O/Materi<br>OH | Rp. 500.000<br>Rp. 100.000<br>Rp. 100.000<br>Rp. 100.000<br>Rp. 250.000<br>Rp. 300.000 |
| 19 | Tim Penilai / Juri / Wasit / Dewan Hakim kegiatan Lomba dan kegiatan sejenisnya<br>a. Ketua<br>b. Sekretaris<br>c. Anggota  | O/JP<br>O/JP<br>O/JP                             | Rp. 60.000<br>Rp. 50.000<br>Rp. 40.000   |
| 20 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Bulletin / Majalah yang dilaksanakan secara rutin / setiap 1 bulan / 3 Bulan<br>a. Penanggungjawab<br>b. Redaktur<br>c. Penyunting/editor<br>d. Redaktur Pelaksana<br>e. Sekretaris<br>f. Pembuat artikel  | O/K<br>O/K<br>O/K<br>O/K<br>O/K<br>O/K           | Rp. 250.000<br>Rp. 200.000<br>Rp. 175.000<br>Rp. 150.000<br>Rp. 125.000<br>Rp. 100.000 |
| 21 | Honorarium Tim Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah<br>a. Komandan Satuan<br>b. Komandan Operasional<br>c. Komandan Regu<br>d. Anggota  | O/B<br>O/B<br>O/B<br>O/B                         | Rp. 250.000<br>Rp. 200.000<br>Rp. 150.000<br>Rp. 100.000                               |
| 22 | Honorarium Tim Pelaksana Petugas Patroli Pengamanan dan Kamtibmas<br>a. Komandan Satuan<br>b. Komandan Operasional<br>c. Komandan Regu<br>d. Anggota  | O/K<br>O/K<br>O/K<br>O/K                         | Rp. 100.000<br>Rp. 75.000<br>Rp. 50.000<br>Rp. 30.000                                  |
| 23 | Honorarium Koordinator/Operator/Pengantar SP2D dan Advis<br>a. Operator Komputer pada Dinas/Badan/Kantor/Satker (1 Orang)<br>b. Koordinator dan Operator Komputer Gaji (SIM Gaji), Administrasi Pajak (DTH/RTH), Koordinator dan Administrasi/Operator SPD, Administrator SIMDA pada BPKAD, Operator SIMKEDES, Pengelola/Pengantar SP2D dan Koordinator Advis, Operator Consul PBB/ BPHTB<br>c. Operator Komputer Penatausahaan Keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)<br>d. Operator Komputer SIMDA-OPD (Perencanaan dan Penatausahaan Keuangan 2 Orang) | O/B<br>O/B<br>O/B<br>O/B                         | Rp. 200.000<br>Rp. 500.000<br>Rp. 200.000<br>Rp. 200.000                               |
| 24 | Honorarium Non ASN / Tenaga Kontrak<br>a. Petugas Kebersihan<br>b. Operator alat berat/pengemudi  | O/B<br>O/B                                       | Rp. 1.000.000<br>Rp. 1.000.000   |



| 1  | 2  | 3   | 4  |
|----|--|---|--|
|    | c. Penjaga Kantor<br>d. Pol - PP<br>e. Operator SIAK/E-KTP/Pajak<br>f. Satgas Damkar dan Penanggulangan Bencana<br>g. Penjaga Pintu Air/Bendung  | O/B<br>O/B<br>O/B<br>O/B<br>O/B                               | Rp. 1.000.000<br>Rp. 1.000.000<br>Rp. 1.000.000<br>Rp. 1.000.000<br>Rp. 1.000.000                                      |
| 25 | Honor Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPGR) Keuangan dan Barang Daerah Kab. Pringsewu<br>a. Pembina<br>b. Ketua<br>c. Wakil Ketua<br>d. Sekretaris<br>e. Anggota<br>f. Ketua Sekretariat<br>g. Tim Teknis Sekretariat<br>h. Anggota Sekretariat | O/B<br>O/B<br>O/B<br>O/B<br>O/B<br>O/B<br>O/B<br>O/B          | Rp. 1.000.000<br>Rp. 800.000<br>Rp. 750.000<br>Rp. 700.000<br>Rp. 600.000<br>Rp. 700.000<br>Rp. 600.000<br>Rp. 500.000 |
| 26 | Honorarium Penunjang Pengembangan / Penelitian / Perekayasaan<br>a. Ketua Peneliti<br>b. Koordinator Peneliti<br>c. Sekretariat Peneliti<br>d. Pengolahan Data<br>e. Petugas Survey<br>f. Petugas Lapangan<br>g. Pembuat Jurnal Kelitbangan  | O/B<br>O/B<br>O/B<br>Penelitian<br>Responden<br>O/H<br>Jurnal | Rp. 250.000<br>Rp. 200.000<br>Rp. 150.000<br>Rp. 1.500.000<br>Rp. 8.000<br>Rp. 50.000<br>Rp. 200.000                   |
| 27 | Biaya Operasional Penyuluh (ASN/THL) (BP4K)  | O/B   | Rp. 300.000  |
| 28 | Honor Pengelola/Pelaksana Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN pada Puskesmas)<br>a. Penanggungjawab FKTP<br>b. Bendahara JKN Puskesmas<br>c. Verifikator/Staf Pengelola<br>d. Perencana Puskesmas<br>e. Staf ASN Lainnya  | O/B<br>O/B<br>O/B<br>O/B<br>O/B                               | Rp. 250.000<br>Rp. 250.000<br>Rp. 200.000<br>Rp. 200.000<br>Rp. 100.000  |
| 29 | Honor Tim Pengelola Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)<br>a. Ketua<br>b. Wakil Ketua<br>c. Sekretaris<br>d. Koordinator/Verifikator<br>e. Anggota   | O/B<br>O/B<br>O/B<br>O/B<br>O/B                               | Rp. 250.000<br>Rp. 200.000<br>Rp. 175.000<br>Rp. 200.000<br>Rp. 150.000  |
| 30 | Honorarium Tenaga Medis dan Paramedis sebagai Pegawai Tidak Tetap/PTT<br>a. Dokter PTT<br>b. Perawat PTT<br>c. Bidan PTT<br>d. Tenaga Kesehatan Lainnya  | O/B<br>O/B<br>O/B<br>O/B                                      | Rp. 2.500.000<br>Rp. 1.500.000<br>Rp. 1.500.000<br>Rp. 1.000.000   |

| 1  | 2  | 3  | 4  |
|----|--|--|--|
| 31 | Honor Pengelola Obat/Vaksin<br>a. Pengelola Obat Instalasi Farmasi Dinas<br>b. Pengelola Obat Gudang Puskesmas<br>c. Pengelola Vaksin Dinas<br>d. Pengelola Vaksin Puskesmas<br>e. Staf Pengelola Instalasi Farmasi Dinas Non ASN  | O/B<br>O/B<br>O/B<br>O/B<br>O/B                                    | Rp. 250.000<br>Rp. 200.000<br>Rp. 100.000<br>Rp. 75.000<br>Rp. 50.000  |
| 32 | Honorarium Pengawas Pendidikan<br>a. Honorarium Pengawas TK<br>b. Honorarium Pengawas SD<br>c. Honorarium Pengawas Rumpun<br>d. Honorarium Pengawas Pendidikan Agama Islam<br>e. Honorarium Pengawas Pendidikan Masyarakat   | O/B<br>O/B<br>O/B<br>O/B<br>O/B                                    | Rp. 300.000<br>Rp. 300.000<br>Rp. 300.000<br>Rp. 300.000<br>Rp. 300.000  |
| 33 | Honorarium Non ASN bagi Pendidik dan Non Pendidik<br>a. Honorarium Pendidik<br>b. Honorarium Non - Pendidik  | O/B<br>O/B   | Rp. 150.000<br>Rp. 150.000   |
| 34 | Honor / Pengganti Uang Transport Pendamping dan Operator PKH   | O/B  | Rp. 350.000  |
| 35 | Honor Tagana dan Penjaga Gudang <i>Bufferstock</i><br>a. Tagana<br>b. Penjaga Gudang <i>Bufferstock</i>  | O/B<br>O/B   | Rp. 200.000<br>Rp. 200.000   |
| 36 | Honor Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)<br>a. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)<br>b. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)  | O/B<br>O/B   | Rp. 200.000<br>Rp. 150.000   |
| 37 | Honor Pengurus dan Tim Profesi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)<br>a. Pengurus LK3<br>1. Penanggungjawab<br>2. Ketua<br>3. Sekretaris<br>4. Anggota<br>b. Tim Profesi LK3<br>1. Pekerja Sosial<br>2. Psikolog<br>3. Polisi<br>4. Advokad<br>5. Tenaga Konselor<br>6. Tenaga Kesehatan | O/B<br>O/B<br>O/B<br>O/B<br>O/B<br>O/B<br>O/B<br>O/B<br>O/B<br>O/B | Rp. 250.000<br>Rp. 200.000<br>Rp. 175.000<br>Rp. 150.000<br>Rp. 250.000<br>Rp. 250.000<br>Rp. 250.000<br>Rp. 250.000<br>Rp. 250.000<br>Rp. 250.000 |
| 38 | Honor Petugas Pendata PMKS dan PSKS<br>a. Honor Tenaga Input <i>Data Base</i> PMKS<br>1. Operator <i>Data Base</i> PMKS<br>2. Koordinator Wilayah Kecamatan<br>3. Petugas Pendataan PMKS dan PSKS<br>b. Honor Petugas Verifikasi dan Validasi data Kemiskinan  | O/B<br>O/B<br>O/B<br>O/B   | Rp. 200.000<br>Rp. 200.000<br>Rp. 150.000<br>Rp. 600.000   |

| 1  | 2  | 3   | 4  |
|----|--|---|--|
| 39 | Honor Pendamping Cacat Berat, Asistensi Sosial Lanjut Usia, KUBE.  | O/B   | Rp. 150.000  |
| 40 | Honor Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD)<br>a. Tenaga Ahli (Praktisi, Akademisi, Pakar, Sejarawan)<br>b. Tenaga dari Instansi lainnya   | O/B<br>O/B  | Rp. 1.500.000<br>Rp. 1.500.000   |
| 41 | Honorarium Pelaksana LPSE<br>a. Kepala LPSE<br>b. Sekretaris LPSE<br>c. Kepala Sub Unit LPSE<br>d. Anggota Sub Unit  | O/B<br>O/B<br>O/B<br>O/B  | Rp. 500.000<br>Rp. 450.000<br>Rp. 400.000<br>Rp. 300.000   |
| 42 | Honorarium Pengelola Radio Pemerintah Daerah<br>a. Dewan Pengawas<br>1. Ketua<br>2. Wakil Ketua<br>3. Anggota<br>b. Dewan Direksi<br>1. Direktur Utama<br>2. Direktur Teknis<br>3. Direktur Pemberitaan<br>c. Penanggungjawab Penyelenggara Siaran<br>1. Pelaksana Program Siaran<br>2. Pelaksana Pembawa Berita<br>3. Pelaksana Teknis Studio Radio<br>4. Pelaksana Teknis Pemancar Radio<br>5. Pelaksana Teknis Kebersihan<br>6. Pelaksana Teknis Keamanan | O/B<br>O/B<br>O/B<br>O/B<br>O/B<br>O/B<br>O/B<br>O/B<br>O/B<br>O/B<br>O/B<br>O/B<br>O/B<br>O/B<br>O/B | Rp. 750.000<br>Rp. 650.000<br>Rp. 550.000<br>Rp. 500.000<br>Rp. 500.000<br>Rp. 500.000<br>Rp. 500.000<br>Rp. 500.000<br>Rp. 500.000<br>Rp. 500.000<br>Rp. 500.000<br>Rp. 500.000<br>Rp. 500.000<br>Rp. 500.000 |

c. Honorarium Pelaksana Unit Layanan Pengadaan adalah sebagai berikut:

| No | Uraian                             | Satuan | Biaya         |
|----|------------------------------------|--------|---------------|
| 1  | Ketua Unit Layanan Pengadaan       | O/B    | Rp. 1.000.000 |
| 2  | Sekretaris Unit Layanan Pengadaan  | O/B    | Rp. 750.000   |
| 3  | Kepala Sub Unit Layanan Pengadaan  | O/B    | Rp. 500.000   |
| 4  | Anggota Sub Unit Layanan Pengadaan | O/B    | Rp. 350.000   |

d. Honorarium Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja ULP adalah sebagai berikut:

| No | Uraian  | Satuan | Biaya       |
|----|---|--------|-------------|
| 1  | 2   | 3      | 4           |
| 1  | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah       | O/B    | Rp. 400.000 |
| 2  | Pagu Pengadaan Barang/Konstruksi dengan nilai Pagu s.d 200 jt |        |             |
|    | a. Ketua Pokja ULP  | O/P    | Rp. 250.000 |
|    | b. Anggota  | O/P    | Rp. 225.000 |

| 1  | 2  | 3   | 4           |
|----|--|-----|-------------|
| 3  | Pagu Pengadaan Barang/Konstruksi dengan nilai Pagu > 200 jt s.d 500 jt |     |             |
|    | a. Ketua Pokja ULP   | O/P | Rp. 300.000 |
|    | b. Anggota   | O/P | Rp. 275.000 |
| 4  | Pagu Pengadaan Barang/Konstruksi dengan nilai Pagu > 500 jt s.d 1 M    |     |             |
|    | a. Ketua Pokja ULP   | O/P | Rp. 350.000 |
|    | b. Anggota   | O/P | Rp. 325.000 |
| 5  | Pagu Pengadaan Barang/Konstruksi dengan nilai Pagu > 1 M s.d 2,5 M     |     |             |
|    | a. Ketua Pokja ULP   | O/P | Rp. 450.000 |
|    | b. Anggota   | O/P | Rp. 425.000 |
| 6  | Pagu Pengadaan Barang/Konstruksi dengan nilai Pagu diatas 2,5 M        |     |             |
|    | a. Ketua Pokja ULP   | O/P | Rp. 500.000 |
|    | b. Anggota   | O/P | Rp. 475.000 |
| 7  | Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu s.d 50 juta          |     |             |
|    | a. Ketua Pokja ULP   | O/P | Rp. 200.000 |
|    | b. Anggota   | O/P | Rp. 175.000 |
| 8  | Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu > 50 jt s.d 200 jt   |     |             |
|    | a. Ketua Pokja ULP   | O/P | Rp. 300.000 |
|    | b. Anggota   | O/P | Rp. 275.000 |
| 9  | Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu > 200 jt s.d 500 jt  |     |             |
|    | a. Ketua Pokja ULP   | O/P | Rp. 400.000 |
|    | b. Anggota   | O/P | Rp. 375.000 |
| 10 | Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu > 500 jt s.d 1 M     |     |             |
|    | a. Ketua Pokja ULP   | O/P | Rp. 500.000 |
|    | b. Anggota   | O/P | Rp. 475.000 |
| 11 | Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas 1 M                |     |             |
|    | a. Ketua Pokja ULP   | O/P | Rp. 600.000 |
|    | b. Anggota   | O/P | Rp. 575.000 |

e. Honorarium Tim/Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan adalah sebagai berikut:

| No | Uraian  | Satuan | Biaya       |
|----|---|--------|-------------|
| 1  | 2   | 3      | 4           |
| 1  | Honorarium Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan         | O/B    | Rp 300.000  |
| 2  | Pagu Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai Rp. 200 jt s.d 500 jt |        |             |
|    | a. Ketua  | O/P    | Rp 200.000  |
|    | b. Sekretaris   | O/P    | Rp. 175.000 |
|    | c. Anggota  | O/P    | Rp 150.000  |
| 3  | Pagu Pengadaan Barang/Jasa diatas Rp. 500 jt s/d Rp. 1 M      |        |             |
|    | a. Ketua  | O/P    | Rp. 250.000 |
|    | b. Sekretaris   | O/P    | Rp 225.000  |
|    | c. Anggota  | O/P    | Rp 200.000  |

| 1 | 2  | 3   | 4           |
|---|--|-----|-------------|
| 4 | Pagu Pengadaan Barang/Jasa Rp. 1 M s/d Rp. 2,5 M |     |             |
|   | a. Ketua   | O/P | Rp. 300.000 |
|   | b. Sekretaris                                    | O/P | Rp. 275.000 |
|   | c. Anggota                                       | O/P | Rp. 250.000 |
| 5 | Pagu Pengadaan Barang/Jasa diatas Rp. 2,5 M      |     |             |
|   | a. Ketua   | O/P | Rp. 350.000 |
|   | b. Sekretaris                                    | O/P | Rp. 300.000 |
|   | c. Anggota                                       | O/P | Rp. 275.000 |

f. Biaya Paket Pemeriksaan Khusus Inspektorat

| No | Uraian                              | Satuan | Biaya         |
|----|-------------------------------------|--------|---------------|
| 1  | Biaya Paket Pemeriksaan Khusus      | Paket  | Rp. 3.000.000 |
|    | a. Biaya Proses Pengumpulan Data    |        |               |
|    | b. Biaya Transportasi Tim ke Lokasi |        |               |
|    | c. Uang Lembur Tim                  |        |               |
|    | d. Biaya Penyusunan Laporan         |        |               |

g. Honorarium Panitia dan Sekretariat Seleksi Pengisian dan Mutasi JPT Pratama

| No | Uraian  | Satuan | Biaya         |
|----|---|--------|---------------|
| 1  | a. Honorarium Panitia Seleksi Pengisian JPT Pratama             |        |               |
|    | 1. Ketua  | O/K    | Rp. 7.000.000 |
|    | 2. Sekretaris   | O/K    | Rp. 6.500.000 |
|    | 3. Anggota  | O/K    | Rp. 6.000.000 |
|    | b. Honorarium Panitia Seleksi Mutasi JPT Pratama                |        |               |
|    | 1. Ketua  | O/K    | Rp. 5.000.000 |
|    | 2. Sekretaris   | O/K    | Rp. 4.500.000 |
|    | 3. Anggota  | O/K    | Rp. 4.000.000 |
|    | c. Honorarium Sekretariat Panitia Seleksi Pengisian JPT Pratama |        |               |
|    | 1. Ketua  | O/B    | Rp. 3.000.000 |
|    | 2. Sekretaris   | O/B    | Rp. 2.500.000 |
|    | 3. Anggota  | O/B    | Rp. 2.000.000 |

h. Honorarium Tim dan Sekretariat Baperjakat

| No | Uraian                               | Satuan | Biaya       |
|----|--------------------------------------|--------|-------------|
| 1  | a. Honorarium Tim Baperjakat         |        |             |
|    | 1. Ketua                             | O/B    | Rp. 850.000 |
|    | 2. Sekretaris                        | O/B    | Rp. 750.000 |
|    | 3. Anggota                           | O/B    | Rp. 650.000 |
|    | b. Honorarium Sekretariat Baperjakat |        |             |
|    | 1. Ketua                             | O/B    | Rp. 350.000 |
|    | 2. Sekretaris                        | O/B    | Rp. 300.000 |
|    | 3. Anggota                           | O/B    | Rp. 200.000 |

i. Honorarium Pembimbing/Mentor Peserta Diklat

| No | Uraian                                      | Satuan | Biaya       |
|----|---|--------|-------------|
| 1  | Honorarium Pembimbing/Mentor Peserta Diklat |        |             |
|    | a. Honor Mentor Diklat PIM II               | O/K    | Rp. 500.000 |
|    | b. Honor Mentor Diklat PIM III              | O/K    | Rp. 400.000 |
|    | c. Honor Mentor Diklat PIM IV               | O/K    | Rp. 300.000 |
|    | d. Honor Mentor Prajabatan                  | O/K    | Rp. 250.000 |

j. Honorarium Panitia dan Sekretariat Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi

| No | Uraian  | Satuan | Biaya       |
|----|---|--------|-------------|
| 1  | a. Honorarium Panitia Seleksi Peserta Diklat Instansi         |        |             |
|    | 1. Ketua  | O/K    | Rp. 750.000 |
|    | 2. Sekretaris   | O/K    | Rp. 700.000 |
|    | 3. Anggota  | O/K    | Rp. 650.000 |
|    | b. Honorarium Sekretariat Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi |        |             |
|    | 1. Ketua  | O/K    | Rp. 500.000 |
|    | 2. Sekretaris   | O/K    | Rp. 400.000 |
|    | 3. Anggota  | O/K    | Rp. 300.000 |

k. Honorarium Kegiatan Diklat Prajabatan dan PIM IV

| No | Uraian  | Satuan | Biaya         |
|----|---|--------|---------------|
| 1  | a. Honorarium Kegiatan Diklat Prajabatan dan PIM IV |        |               |
|    | 1. <i>Lession Officer</i>                           | O/K    | Rp. 1.000.000 |
|    | 2. Evaluasi Penyelenggaraan                         | O/K    | Rp. 1.500.000 |

l. Uang Lembur, Uang Piket dan Uang Makan

| No | Uraian   | Satuan | Biaya       |
|----|--|--------|-------------|
| 1  | Uang Lembur (Lembur Maksimal 30 jam kerja/orang per 1 bulan, maksimal per hari 4 jam)  |        |             |
|    | a. Golongan IV   | O/J    | Rp. 15.000  |
|    | b. Golongan III  | O/J    | Rp. 13.000  |
|    | c. Golongan II   | O/J    | Rp. 10.000  |
|    | d. Golongan I  | O/J    | Rp. 8.000   |
|    | e. Non ASN   | O/J    | Rp. 7.000   |
| 2. | Uang Makan Lembur sebesar Rp. 20.000,-/org (diberikan kepada semua golongan secara berturut-turut minimal 3 Jam Lembur dan diberikan maksimal 1 kali per hari) | O/K    | Rp. 20.000  |
| 3. | Uang Piket dan Uang Makan  |        |             |
|    | a. Uang Piket (Uang Piket hanya diberikan kepada yang melaksanakan Piket)  | O/K    | Rp. 30.000  |
|    | b. Uang Makan (Uang Makan diberikan kepada seluruh Anggota Satuan Non ASN)   | O/B    | Rp. 420.000 |

II. Biaya Pendidikan dan Beasiswa

- a. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan diberikan uang saku selama pendidikan:

| No | Uraian                        | Satuan | Biaya          |
|----|-------------------------------|--------|----------------|
| 1  | Belanja Diklat PIM :          |        |                |
|    | a. Diklat Penjurangan PIM II  | O/K    | Rp. 10.000.000 |
|    | b. Diklat Penjurangan PIM III | O/K    | Rp. 5.000.000  |
|    | c. Diklat Penjurangan PIM IV  | O/K    | Rp. 2.000.000  |

- b. Biaya Pengiriman Peserta untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Substantif atau Fungsional

| No | Uraian  | Satuan   | Biaya (Rp) |
|----|---|----------|------------|
| 1  | Belanja Kursus-kursus singkat / pelatihan / Bimtek/ Workshop / Loka Karya dan sejenisnya: |          |            |
|    | a. Didalam Wilayah Kabupaten Pringsewu Uang Saku dan Bantuan Transport Peserta            | O/H      | Rp. 50.000 |
|    | b. Keluar Wilayah Pringsewu (Provinsi Lampung):   |          |            |
|    | 1. Biaya Kontribusi   | O/H      | X          |
|    | 2. Uang Saku Transport PP Peserta (sesuai Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas)      | O/H      | X          |
|    | c. Keluar Wilayah Provinsi Lampung:   |          |            |
|    | 1. Biaya Kontribusi   | Org/Agkt | X          |
|    | 2. Uang Saku dan Transport PP Peserta (sesuai Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas)  | Org/Agkt | X          |

Ket : X = sesuai dengan biaya yang ditentukan penyelenggara.

- c. Biaya Pendidikan Tugas Belajar ASN yang tidak dibiayai Pemerintah Pusat, Pelaksana, Penyelenggara

| No | Uraian   | Satuan   | Biaya         |
|----|--|----------|---------------|
| 1  | 2  | 3        | 4             |
| 1. | Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3  |          |               |
|    | Dalam Negeri:  |          |               |
|    | a. Uang Saku, Uang makan dan pondokan  | O/B      | Rp. 900.000   |
|    | b. Bantuan Tugas Akhir/Buku/Referensi/Skripsi/Wisuda   | Org/Angk | Rp. 2.500.000 |
|    | Luar Negeri/ <i>Double Degree</i>  |          |               |
|    | a. Uang Saku, Uang makan dan pondokan  | Org/Angk | Rp. 2.000.000 |
|    | b. Bantuan Tugas Akhir/Buku/Referensi/Skripsi/Wisuda   | Org/Angk | Rp. 4.000.000 |
|    | c. Bantuan Administrasi Keimigrasian   | Org/Angk | Rp. 1.500.000 |
|    | Catatan:<br>Besaran biaya kontribusi peserta disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada saat dan tempat pendidikan yang menjadi mitra kerja. |          |               |

| 1  | 2  | 3  | 4  |
|----|--|--|--|
| 2. | <p>Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1</p> <p>Dalam Negeri.</p> <p>a. Uang Saku, Uang Makan dan Pondokan</p> <p>b. Bantuan Tugas Akhir/Buku/Referensi/Skripsi/Wisuda</p> <p>Luar Negeri/<i>Double Degree</i></p> <p>a. Uang Saku, Uang Makan dan Pondokan</p> <p>b. Bantuan Tugas Akhir/Buku/Referensi/Skripsi/Wisuda</p> <p>c. Bantuan Administrasi Keimigrasian</p> <p>Catatan:<br/>Besaran biaya kontribusi peserta disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada saat dan tempat pendidikan yang menjadi mitra kerja.</p> | <p>O/B</p> <p>Org/Angk</p> <p>Org/Angk</p> <p>Org/Angk</p> <p>Org/Angk</p> | <p>Rp. 1.000.000</p> <p>Rp. 3.000.000</p> <p>Rp. 2.500.000</p> <p>Rp. 5.000.000</p> <p>Rp. 1.500.000</p> |
| 3. | <p>Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2</p> <p>Dalam Negeri:</p> <p>a. Uang Saku, Uang makan dan pondokan</p> <p>b. Bantuan Tugas Akhir/Buku/Referensi/Skripsi/Wisuda</p> <p>Luar Negeri/<i>Double Degree</i></p> <p>a. Uang Saku, Uang makan dan pondokan</p> <p>b. Bantuan Tugas Akhir/Buku/Referensi/Skripsi/Wisuda</p> <p>c. Bantuan Administrasi Keimigrasian</p> <p>Catatan:<br/>Besaran biaya kontribusi peserta disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada saat dan tempat pendidikan yang menjadi mitra kerja.</p> | <p>O/B</p> <p>Org/Angk</p> <p>Org/Angk</p> <p>Org/Angk</p> <p>Org/Angk</p> | <p>Rp. 1.500.000</p> <p>Rp. 3.000.000</p> <p>Rp. 3.000.000</p> <p>Rp. 6.000.000</p> <p>Rp. 1.500.000</p> |

d. Biaya Pendidikan Tugas Belajar bagi ASN yang seluruh biayanya ditanggung oleh Pemerintah Pusat/Pelaksana/Penyanggung

| No | Uraian  | Satuan | Biaya         |
|----|---|--------|---------------|
| 1. | Biaya Bantuan Uang Saku/Uang Makan Dalam Negeri | O/B    | Rp. 1.000.000 |
| 2. | Biaya Bantuan Uang Saku/Uang Makan Luar Negeri  | O/B    | Rp. 2.500.000 |

### III. Belanja Barang/Jasa Pemeliharaan dan Belanja Lainnya

| No | Uraian                          | Satuan | Biaya                               | Keterangan  |
|----|---------------------------------|--------|-------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                               | 3      | 4                                   | 5           |
| 1. | Belanja Telepon                 | U/B    | Disesuaikan dengan tagihan rekening | Seluruh OPD |
| 2. | Belanja Listrik                 | U/B    |                                     |             |
| 3. | Biaya Air/PAM                   | U/B    |                                     |             |
| 4. | Belanja Kawat/Faximile/Internet | U/B    |                                     |             |



| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
|-----|---|---|---|---|
| 5.  | Belanja Alat Tulis Kantor<br>a. Pagu anggaran s/d 100 juta<br>b. Pagu anggaran 100 s/d 300 juta<br>c. Pagu anggaran 300 s/d 500 juta<br>d. Pagu anggaran 500 juta s/d 1 miliar<br>e. Pagu anggaran diatas 1 miliar                          | /Kegiatan<br>/Kegiatan<br>/Kegiatan<br>/Kegiatan<br>/Kegiatan | Rp. 750.000<br>Rp. 1.500.000<br>Rp. 2.000.000<br>Rp. 2.500.000<br>Rp. 3.500.000         | Untuk kegiatan<br>Diklat, Bimtek,<br>Wokshop,<br>Sosialisasi dan<br>kegiatan<br>sejenisnya<br>menyesuaikan<br>dengan jumlah<br>peserta dan<br>kebutuhan |
| 6.  | Belanja Dokumentasi dan Pameran<br>(Khusus Pengisian Materi):<br>a. HUT Kabupaten Pringsewu<br>b. HUT Provinsi Lampung  | Paket<br>Paket  | Rp. 20.000.000<br>Rp. 15.000.000  | Termasuk<br>kendaraan hias  |
| 7.  | Belanja Makanan dan Minuman<br>a. Makan Minum Rumah Tangga<br>1) Bupati<br>2) Wakil Bupati<br>b. Jamuan Makan (Nasi Kotak)<br>c. Jamuan Makan (Prasmanan)<br>Tamu Bupati/Ketua DPRD<br>d. Snack Tamu Bupati/Ketua DPRD<br>e. Snack Kegiatan | U/B<br>U/B<br>O/Kotak<br>O/Porsi<br>O/Kotak<br>O/Kotak        | Rp. 20.000.000<br>Rp. 15.000.000<br>Rp. 20.000<br>Rp. 50.000<br>Rp. 20.000<br>Rp. 8.000 |   |
| 8.  | Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor<br>Badan/Dinas/Kantor  | U/T   | Rp. 10.000.000  |   |
| 9.  | Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas:   |   |   |   |
|     | a. Bupati   | U/T   | Rp. 50.000.000  |   |
|     | b. Wakil Bupati   | U/T   | Rp. 30.000.000  |   |
|     | c. Sekretaris Daerah  | U/T   | Rp. 20.000.000  |   |
| 10. | Biaya Pemeliharaan Pendopo  | U/T   | Rp. 20.000.000  |   |
| 11. | Belanja Sewa Gedung/Kantor/<br>Gudang/ Tempat   |   |   |   |
|     | a. Gedung/kantor/ruang kerja  | U/T   | Rp. 30.000.000  |   |
|     | b. Tempat Penyimpanan/Gudang  | U/T   | Rp. 15.000.000  |   |
| 12. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan<br>Ruang/RuangRapat/Pertemuan<br>Catatan:<br>Sewa gedung pertemuan sudah termasuk<br>peralatan dan perlengkapan pertemuan<br>(meja, kursi, sound system, dll), biaya<br>kebersihan dan pengamanan.       | U/H   | Rp. 3.000.000   |   |
| 13. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat   |   |   |   |
|     | a. Kendaraan Bermotor Bus Roda 6<br>Besar (termasuk BBM dan Supir)  | U/H   | Rp. 3.500.000   | Sewa<br>Kendaraan<br>untuk Luar<br>Provinsi<br>disesuaikan<br>dengan Harga<br>Real  |
|     | b. Kendaraan Bermotor Bus Roda 6<br>Sedang  | U/H   | Rp. 2.300.000   |   |
|     | c. Kendaraan Bermotor Roda 6 Truk   | U/H   | Rp. 1.500.000   |   |
|     | d. Kendaraan Bermotor Roda 4  | U/H   | Rp. 500.000   |   |
|     | e. Kendaraan Bermotor Roda 2  | U/H   | Rp. 50.000  |   |

| 1   | 2   | 3  | 4   | 5 |
|-----|---|--|---|---|
| 14. | <p>Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional pada Sekretariat Daerah/Badan/Dinas/Sekwan/Bagian/Camat dan Komisi</p> <p>a. Biaya Reparasi &amp; Penggantian Suku Cadang:</p> <p>1. Mobil Minibus (1000-1500cc)</p> <p>2. Mobil Minibus diatas 1500cc</p> <p>3. Mobil Bus ¾, Bus Besar, Truk</p> <p>4. Sepeda Motor/Roda Tiga</p>  | <p>U/T</p> <p>U/T</p> <p>U/T</p> <p>U/T</p>  | <p>Rp. 3.500.000</p> <p>Rp. 4.500.000</p> <p>Rp. 5.800.000</p> <p>Rp. 750.000</p>   |   |
|     | <p>b. Biaya Servis</p> <p>1. Mobil Minibus (1000 - 1500cc)</p> <p>2. Mobil Minibus diatas 1500cc</p> <p>3. Mobil Bus ¾, Bus Besar, Truk</p> <p>4. Sepeda Motor/Roda Tiga</p> <p>c. Biaya Pembelian BBM</p> <p>1. Mobil Minibus/Pick up/Bus</p> <p>2. Mobil Truk Sampah</p> <p>3. Mobil Pengawalan</p> <p>4. Sepeda Motor/Roda Tiga</p> <p>d. Biaya Pembelian Pelumas</p> <p>1. Mobil Minibus (1000-1500cc)</p> <p>2. Mobil Minibus diatas 1500cc</p> <p>3. Mobil Bus, Truk</p> <p>4. Sepeda Motor/Roda Tiga</p> <p>e. Pembelian Accu</p> <p>1. Mobil Minibus, Jeep</p> <p>2. Mobil Bus, Truk</p> <p>3. Sepeda Motor/Roda Tiga</p> <p>f. Bantuan Pembelian Ban</p> <p>Mobil Minibus (1000-1500cc)</p> <p>1. Mobil Minibus diatas 1500cc</p> <p>2. Mobil Bus, Truk</p> <p>3. Sepeda Motor/Roda Tiga</p> | <p>U/T</p> <p>U/T</p> <p>U/T</p> <p>U/T</p> <p>U/B</p> <p>U/B</p> <p>U/B</p> <p>U/B</p> <p>U/B</p> <p>U/B</p> <p>U/B</p> <p>U/B</p> <p>U/B</p> <p>U/B</p> <p>U/B</p> <p>U/T</p> <p>U/T</p> <p>U/T</p> <p>U/T</p> <p>U/T</p> <p>U/T</p> | <p>Rp. 1.500.000</p> <p>Rp. 2.000.000</p> <p>Rp. 2.500.000</p> <p>Rp. 500.000</p> <p>Rp. 2.000.000</p> <p>Rp. 2.500.000</p> <p>Rp. 3.000.000</p> <p>Rp. 500.000</p> <p>Rp. 400.000</p> <p>Rp. 600.000</p> <p>Rp. 600.000</p> <p>Rp. 50.000</p> <p>Rp. 800.000</p> <p>Rp. 1.250.000</p> <p>Rp. 200.000</p> <p>Rp. 3.000.000</p> <p>Rp. 4.500.000</p> <p>Rp. 6.000.000</p> <p>Rp. 300.000</p> |   |
| 15. | <p>Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten dan Pimpinan DPRD</p> <p>a. Bupati /Wakil Bupati</p> <p>1. Biaya Reparasi dan Penggantian suku cadang</p> <p>2. Biaya Service</p> <p>3. Biaya Pembelian BBM/ Premix</p> <p>4. Biaya Pembelian Pelumas</p> <p>5. Pembelian Accu</p> <p>6. Pembelian Ban</p>  | <p>U/T</p> <p>U/T</p> <p>U/B</p> <p>U/B</p> <p>U/T</p> <p>U/T</p>  | <p>Rp. 30.000.000</p> <p>Rp. 15.000.000</p> <p>Rp. 5.500.000</p> <p>Rp. 1.500.000</p> <p>Rp. 800.000</p> <p>Rp. 9.000.000</p>   |   |

| 1   | 2   | 3                                      | 4  | 5 |
|-----|---|--|--|---|
|     | b. Sekretaris Daerah<br>1. Biaya Reparasi dan Penggantian suku cadang<br>2. Biaya Service<br>3. Biaya Pembelian BBM/Premix<br>4. Biaya Pembelian Pelumas<br>5. Pembelian Accu<br>6. Pembelian Ban   | U/T<br>U/T<br>U/B<br>U/B<br>U/T<br>U/T | Rp. 25.000.000<br>Rp. 10.000.000<br>Rp. 5.000.000<br>Rp. 1.500.000<br>Rp. 800.000<br>Rp. 9.000.000 |   |
|     | c. DPRD (Mobil Ketua/Wakil Ketua)<br>1. Biaya Reparasi dan Penggantian suku cadang<br>2. Biaya Service<br>3. Biaya Pembelian BBM/ Premix<br>4. Biaya Pembelian Pelumas<br>5. Pembelian Accu<br>6. Pembelian Ban   | U/T<br>U/T<br>U/B<br>U/B<br>U/T<br>U/T | Rp. 25.000.000<br>Rp. 10.000.000<br>Rp. 5.000.000<br>Rp. 1.500.000<br>Rp. 800.000<br>Rp. 9.000.000 |   |
| 16. | Belanja Jasa Kir Kendaraan Dinas/Operasional  | U/T                                    | Rp. 250.000  |   |
| 17. | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK):<br>a. Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati<br>1. Kendaraan Dinas Bupati<br>2. Kendaraan Dinas Wakil Bupati<br>b. Kendaraan Dinas/Operasional<br>1. Kendaraan roda 6<br>2. Kendaraan roda 4<br>3. Kendaraan roda 3<br>4. Kendaraan roda 2 | U/T<br>U/T<br>U/T<br>U/T<br>U/T<br>U/T | Rp. 2.500.000<br>Rp. 2.500.000<br>Rp. 2.500.000<br>Rp. 2.000.000<br>Rp. 250.000<br>Rp. 200.000     |   |
| 18. | Belanja Sewa Alat Berat<br>a. Belanja Sewa Eskavator<br>b. Belanja Sewa Buldoser  | U/J<br>U/J                             | Rp. 250.000<br>Rp. 200.000   |   |
| 19  | Biaya Asuransi Kendaraan Dinas Roda Empat   | U/T                                    | Rp. 6.000.000  |   |
| 20. | Belanja Sewa Meja dan Kursi<br>a. Sewa Meja (Penerima tamu)<br>b. Sewa Kursi Lipat (Lipat Standar)<br>c. Sewa Meja Kursi (Sova Kelas VIP)<br>d. Sewa Sarung Kursi<br>e. Sewa Meja VIP   | U/K<br>U/K<br>U/K<br>U/K<br>U/K        | Rp. 15.000<br>Rp. 3.000<br>Rp. 50.000<br>Rp. 4.000<br>Rp. 75.000                                   |   |
| 21. | Belanja Sewa Generator<br>a. Sewa Genset Kekuatan 10.000 Watt (Silent)<br>b. Sewa Genset Kekuatan 10.000 Watt (Biasa)   | U/H<br>U/H                             | Rp. 1.500.000<br>Rp. 1.000.000   |   |
| 22. | Belanja Sewa Tenda/Tarub/Panggung Sewa Tenda  | U/K                                    | Rp. 200.000  |   |



| 1   | 2  | 3   | 4   | 5   |
|-----|--|---|---|---|
| 26. | Belanja Pakaian Hari-hari/Khusus (Batik Kegiatan MTQ, HUT Kabupaten, dan HUT Provinsi)<br>a. Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD<br>b. Anggota DPRD, Sekda<br>c. Asisten dan Eselon II<br>d. Eselon III<br>e. Eselon IV dan Staf   | /stel<br>/stel<br>/stel<br>/stel<br>/stel | Rp. 1.000.000<br>Rp. 750.000<br>Rp. 500.000<br>Rp. 400.000<br>Rp. 300.000 | Diberlakukan hanya dalam 3 (tiga) kegiatan tersebut |
| 27. | Honorarium Peserta Kegiatan dan Biaya Transport/konsumsi dan uang saku bagi Anggota Masyarakat, Kelompok Tani, OKP, Ormas dan Siswa yang ditunjuk melaksanakan kegiatan<br>a. Didalam Wilayah Kabupaten Pringsewu<br>b. Keluar Wilayah Kabupaten Pringsewu dalam Provinsi Lampung<br>c. Keluar Wilayah Kabupaten Pringsewu Luar Provinsi Lampung | O/H<br>O/H<br>O/H                         | Rp. 50.000<br>Rp. 150.000<br>Rp. 250.000                                  |   |

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017  
NOMOR